

## PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ahmad Taufiqurrohman \*<sup>1</sup>  
Rifqi Hidayat <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sains Al Quran

\*e-mail : [rifqihidayat363@gmail.com](mailto:rifqihidayat363@gmail.com), [Taufiqeohman0987@gmail.com](mailto:Taufiqeohman0987@gmail.com)

### Abstrak

*Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak didirikan pada tahun 1926, NU telah tampil sebagai kekuatan keagamaan, sosial, dan budaya yang menjembatani nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. NU tidak hanya berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, melalui momen historis seperti Resolusi Jihad, tetapi juga terus aktif dalam pembangunan nasional, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pemeliharaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dengan prinsip moderatisme dan komitmen terhadap Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), NU berperan sebagai penjaga moralitas publik sekaligus benteng terhadap ekstremisme dan disintegrasi bangsa. Artikel ini mengulas bagaimana NU menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab di tengah keberagaman Indonesia.*

**Kata kunci:** Nahdlatul ulama, kebangsaan, keislaman moderat, toleransi

### Abstract

*Nahdlatul Ulama (NU) is one of the largest Islamic organizations in Indonesia, playing a central role in the dynamics of national life. Since its establishment in 1926, NU has emerged as a religious, social, and cultural force that bridges Islamic values with the spirit of nationalism. NU has not only contributed to the struggle for independence most notably through historic moments such as the Jihad Resolution but has also remained actively involved in national development, education, community economic empowerment, and the promotion of tolerance and interfaith harmony. With its principles of moderation and commitment to Pancasila and the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), NU serves as a guardian of public morality and a bulwark against extremism and national disintegration. This article explores how NU has become a vital pillar in building a just, peaceful, and civilized society amidst Indonesia's rich diversity.*

**Keywords:** Nahdlatul Ulama, nationalism, moderate Islam, tolerance

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, organisasi keagamaan telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional, menjaga moralitas publik, serta menjadi bagian dari kekuatan sosial yang mendorong perubahan. Salah satu organisasi Islam yang memiliki pengaruh besar dan rekam jejak panjang dalam kehidupan kebangsaan adalah Nahdlatul Ulama (NU). Didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para ulama pesantren yang dipimpin Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, NU lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap tantangan kolonialisme serta upaya mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan toleran. Sejak awal berdirinya, NU tidak hanya berfokus pada urusan keagamaan, tetapi juga aktif dalam bidang sosial, pendidikan, dan perjuangan politik kebangsaan. NU tumbuh dari rahim pesantren-pesantren tradisional yang menjadi pusat pembentukan karakter umat dan pusat pembelajaran Islam yang membumi. Dengan jaringan pesantren yang luas dan pengaruh ulama yang kuat, NU hadir sebagai kekuatan sosial yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput. Islam yang dibawa NU adalah Islam yang ramah, bukan marah; yang sejuk dan mengayomi, bukan memaksa. komitmen NU terhadap tanah air tampak jelas sejak masa perjuangan kemerdekaan. Salah satu momen penting adalah dikeluarkannya Resolusi Jihad pada Oktober 1945 oleh KH. Hasyim Asy'ari, yang menyerukan umat Islam untuk membela kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan Belanda. Seruan ini bukan hanya bentuk

mobilisasi umat, tetapi juga menegaskan bahwa dalam pandangan NU, cinta tanah air adalah bagian dari iman. NU menempatkan nasionalisme dalam kerangka religius, menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan semangat kebangsaan.

Pasca kemerdekaan, NU terus aktif dalam pembangunan bangsa, baik secara langsung melalui jalur politik maupun lewat pendidikan dan pemberdayaan sosial. Meski sempat terjun ke politik praktis dan mendirikan partai, NU kemudian kembali ke khittah-nya pada tahun 1984 dan menegaskan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan. Langkah ini memperkuat posisi NU sebagai penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tetap menjaga jarak dari dinamika politik praktis namun tetap kritis terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat. NU juga dikenal sebagai benteng moderatisme Islam di Indonesia. Dalam konteks kemajemukan bangsa, NU memainkan peran penting dalam merawat toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Prinsip tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan ta'adul (adil) menjadi fondasi dalam setiap gerakan dan dakwah NU. Pandangan NU tentang Pancasila sebagai dasar negara juga sangat jelas: Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan mencerminkan nilai-nilai dasar Islam yang universal seperti keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang. dalam bidang pendidikan, NU memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ribuan pesantren dan lembaga pendidikan formal di bawah naungan NU berperan sebagai pusat pembinaan akhlak, ilmu pengetahuan, dan wawasan kebangsaan. Pesantren NU bukan hanya mencetak ulama, tetapi juga kader-kader bangsa yang siap mengabdikan diri dalam berbagai bidang. Kehadiran universitas dan sekolah tinggi milik NU juga menunjukkan keseriusan organisasi ini dalam memperkuat posisi umat melalui pendidikan. selain pendidikan, NU juga aktif dalam isu-isu sosial-ekonomi. Melalui lembaga seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU), NU mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. NU juga menjalankan berbagai program berbasis komunitas untuk membina koperasi, UMKM, serta memanfaatkan potensi zakat dan wakaf secara produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga tentang kesejahteraan umat.

Di era modern yang penuh tantangan, NU tetap hadir sebagai penjaga moral dan penyejuk suasana di tengah berbagai krisis sosial-politik. Ketika radikalisme dan intoleransi mengancam persatuan bangsa, NU tampil sebagai penggerak Islam moderat yang menolak kekerasan dan ekstremisme. Dengan pendekatan dakwah yang santun dan rasional, NU mampu menjangkau generasi muda sekaligus mengimbangi arus ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan konteks keindonesiaan. dalam konteks demokrasi, NU juga memainkan peran strategis. Para tokoh NU, baik yang berada di organisasi maupun yang terjun dalam pemerintahan, aktif menyuarakan pentingnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. NU senantiasa menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilandasi oleh keadilan sosial dan etika bernegara yang luhur. dengan segala kontribusi dan komitmennya, Nahdlatul Ulama telah menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU bukan hanya penjaga tradisi keislaman yang moderat, tetapi juga penjaga cita-cita luhur Indonesia sebagai bangsa yang damai, adil, dan bersatu dalam keberagaman. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, NU tetap relevan dan dibutuhkan sebagai kekuatan moral, sosial, dan budaya yang memperkuat fondasi keindonesiaan kita bersama.

## Latar belakang

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama pesantren lainnya, seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki keprihatinan atas tantangan besar yang dihadapi umat Islam pada awal

abad ke-20. Saat itu, umat Islam di Indonesia berada dalam tekanan ganda: di satu sisi, mereka menghadapi kolonialisme Belanda yang menindas dan menghambat kemerdekaan, dan di sisi lain, ada guncangan ideologis yang ditimbulkan oleh arus reformisme dari timur tengah yang dipengaruhi oleh pemikiran wahabi sebuah gerakan puritan yang cenderung menolak praktik keislaman tradisional seperti tasawuf, ziarah kubur, dan tahlilan yang telah mengakar dalam masyarakat muslim nusantara.

Dominasi pemikiran wahabi, khususnya di Hijaz (sekarang Arab Saudi), berimplikasi serius terhadap posisi para ulama tradisional Indonesia. Kebijakan Kerajaan Saudi yang mendukung pemikiran tersebut menyebabkan banyak praktik keagamaan masyarakat Indonesia yang dianggap bid'ah tidak diterima saat mereka menunaikan ibadah haji. Para ulama pesantren khawatir jika arus pemikiran puritan ini dibiarkan masuk tanpa kritik, maka tradisi Islam yang telah berkembang secara kontekstual dan moderat di Indonesia akan tergerus. Oleh karena itu, berdirinya NU merupakan langkah strategis untuk mempertahankan Islam Nusantara yang berciri tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i'tidal (adil). selain persoalan ideologi keagamaan, NU juga lahir sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial-politik yang diciptakan oleh kolonialisme. NU menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak cukup hanya melalui jalur politik dan militer, tetapi juga perlu dibarengi dengan kekuatan kultural dan spiritual. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia menjadi pusat pengkaderan umat sekaligus basis perlawanan intelektual dan spiritual terhadap kolonialisme. NU berkomitmen untuk melestarikan sistem pendidikan pesantren dengan segala kekhasan kurikulumnya yang berbasis kitab kuning, serta menjadikannya sebagai benteng pertahanan umat dari infiltrasi pemikiran asing yang merusak nilai-nilai lokal.

Kepedulian NU terhadap dunia pendidikan juga terlihat dari langkah-langkah konkret mereka dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal, madrasah, dan organisasi pelajar seperti IPNU dan IPPNU. Hal ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya bergerak dalam domain keagamaan tradisional, tetapi juga aktif membangun sistem pendidikan modern yang tetap mempertahankan akar tradisi keilmuan Islam klasik. berdirinya NU juga merupakan kelanjutan dari semangat kebangkitan Islam yang berkembang di awal abad ke-20, seperti ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), dan organisasi-organisasi Islam lain. Namun, NU tampil berbeda karena secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai pembela mazhab Syafi'i dan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah. Dengan demikian, NU mengambil peran sebagai pengawal tradisi keagamaan lokal dalam bingkai nasionalisme dan cinta tanah air. hingga kini, NU tetap mempertahankan karakter dasarnya sebagai ormas Islam yang moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kebangsaan. Kiprah NU dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, perdamaian, serta harmoni antarumat beragama menjadi bagian penting dari narasi sejarah Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam pemikiran dan praktik Nahdlatul Ulama (NU) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, arsip organisasi, dokumen sejarah, serta laporan kegiatan NU dari masa kemerdekaan hingga era kontemporer. Beberapa sumber utama berasal dari karya-karya tokoh NU, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Abdurrahman Wahid, serta panduan resmi organisasi yang diterbitkan oleh pbnu (Pengurus besar nahdlatul ulama).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang sistematis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara interpretatif untuk menemukan pola-pola peran NU dalam konteks historis, sosial, pendidikan, budaya, dan politik kebangsaan Indonesia. keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan

penelusuran literatur yang kredibel dari jurnal nasional dan internasional, dokumen resmi organisasi, serta publikasi akademik dari lembaga terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang akurat dan komprehensif dalam memahami peran strategis Nahdlatul Ulama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. peran nahdlatul ulama di bidang pendidikan

Sejak awal pendiriannya pada tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama (NU) telah menempatkan pendidikan sebagai pilar utama perjuangannya, dengan menjadikan pesantren sebagai fondasi dalam mencetak generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, dan berwawasan kebangsaan. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki akar yang sangat kuat dalam struktur sosial masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah-daerah pelosok. Lembaga ini menjadi sarana penting dalam mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti fiqh (hukum Islam), tauhid (teologi), tafsir (ilmu penafsiran Al-Qur'an), hadis (kajian tradisi Nabi), tasawuf (spiritualitas Islam), hingga ilmu alat seperti nahwu dan sharaf (tata bahasa Arab). Nahdlatul Ulama memandang pesantren tidak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai pusat kaderisasi ulama, penggerak dakwah Islam yang santun, serta lembaga pemberdayaan umat. Di pesantren, para santri tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai kemandirian, kesederhanaan, kedisiplinan, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi karakter khas dari lulusan pesantren yang banyak berperan aktif di tengah masyarakat, baik sebagai pemuka agama, pendidik, pemimpin organisasi, hingga tokoh masyarakat. Salah satu ciri khas pendidikan di pesantren NU adalah penerapan prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah yang mengedepankan tiga nilai utama, tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang). Nilai-nilai ini ditanamkan secara sistematis dalam proses pendidikan di pesantren untuk membentuk pribadi Muslim yang inklusif dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk. Pesantren juga melestarikan tradisi keilmuan Islam klasik melalui metode pembelajaran kitab kuning (*kutub al-turats*), yang tetap relevan hingga kini dengan interpretasi kontekstual terhadap persoalan-persoalan kontemporer.<sup>1</sup>

Di samping peran pendidikan, pesantren Nahdlatul ulama juga turut berperan sebagai agen perubahan sosial. Banyak pesantren yang mengembangkan unit-unit keterampilan dan kewirausahaan bagi santri, seperti pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan bekal ekonomi bagi santri agar dapat mandiri setelah menyelesaikan pendidikan. Bahkan, beberapa pesantren NU telah menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga internasional untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan literasi digital. dalam perkembangan lebih lanjut, NU juga mendorong transformasi pesantren agar tidak tertinggal dari perkembangan pendidikan formal. Beberapa pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal berbasis pesantren, seperti madrasah dan sekolah formal (MI, MTs, MA, hingga SMK), yang disesuaikan dengan kurikulum nasional namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman khas pesantren. NU juga mengadvokasi regulasi pendidikan pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan pengakuan dan jaminan negara terhadap eksistensi serta otonomi pendidikan pesantren. dengan demikian, peran NU dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan pesantren tidak hanya terbatas pada pelestarian tradisi keilmuan Islam, tetapi juga mencakup inovasi pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Pesantren menjadi ruang belajar yang hidup dan dinamis, tempat bersemainya nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keislaman yang damai. Melalui pesantren, NU terus

<sup>1</sup> Sitti Hermina et al., "Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Kendari, 1990-2019," *Journal Idea Of History* 05, no. 02 (2022).

melahirkan generasi yang mampu menjaga warisan tradisi, sekaligus siap menghadapi tantangan masa depan.

## 2. Peran nahdlatul ulama di bidang politik

### Peran Politik Nahdlatul Ulama (NU) dari Pra-Kemerdekaan hingga Era Reformasi

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, memiliki rekam jejak panjang dan signifikan dalam bidang politik nasional. Didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama pesantren dengan tokoh sentral KH. Hasyim Asy'ari, NU awalnya bertujuan untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah serta melindungi kepentingan umat Islam, khususnya dalam menghadapi penetrasi ideologi-ideologi asing dan dominasi kolonial. Namun, dalam perjalanannya, NU tidak hanya bergerak di ranah keagamaan dan pendidikan pesantren, tetapi juga mengambil peran penting dalam dinamika politik kebangsaan Indonesia. Keterlibatan politik NU secara aktif bermula dari masa penjajahan, ketika para ulama pesantren menjadi motor penggerak perlawanan rakyat terhadap penjajah. Salah satu momen penting adalah dikeluarkannya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 oleh KH. Hasyim Asy'ari. Fatwa ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajah Belanda (yang berusaha kembali melalui pasukan Sekutu) adalah fardhu 'ain bagi setiap Muslim. Resolusi ini menjadi landasan moral dan spiritual yang kuat bagi perjuangan bersenjata di berbagai daerah, terutama dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Resolusi Jihad tidak hanya bernilai religius, tetapi juga merupakan langkah strategis politik untuk memperkuat legitimasi kemerdekaan Indonesia di tengah kekacauan politik global pasca-Perang Dunia II.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, NU sempat bergabung dengan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), sebuah partai politik Islam besar saat itu. Namun, karena perbedaan pandangan dan kepentingan antara NU dan kelompok modernis dalam Masyumi, NU akhirnya memutuskan untuk keluar dan membentuk **Partai NU** pada tahun 1952. Keputusan ini menunjukkan bahwa NU tidak segan untuk terjun langsung ke dalam kancah politik praktis demi memperjuangkan aspirasi umat dan memastikan nilai-nilai Islam tradisional tidak terpinggirkan dalam proses pembentukan negara.<sup>2</sup>

Partai NU cukup berpengaruh dalam politik era Demokrasi Liberal (1950-an), dan menduduki sejumlah posisi penting dalam kabinet. Namun, pada masa Orde Baru, NU mengalami tekanan politik yang besar akibat dominasi Golkar sebagai partai penguasa. Pada tahun 1973,

Nahdlatul ulama bersama partai Islam lainnya dipaksa melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun demikian, NU tetap memainkan peran penting sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam isu-isu keumatan dan ketidakadilan sosial.

Puncak transformasi NU terjadi pada era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), cucu KH. Hasyim Asy'ari, yang membawa NU keluar dari politik praktis pada tahun 1984 dan mengembalikan NU ke khittah 1926 yakni fokus pada dakwah, pendidikan, dan pengembangan sosial keagamaan tanpa terlibat langsung dalam partai politik. Namun demikian, NU tetap menjadi kekuatan politik moral yang mempengaruhi kebijakan nasional.

Pasca Reformasi 1998, dinamika NU kembali berubah. Gus Dur menjadi presiden ke-4 Republik Indonesia melalui jalur politik, sebagai representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh kalangan NU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal NU memisahkan diri dari politik praktis, relasi antara NU dan politik tetap erat melalui afiliasi personal, kultural, dan ideologis.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Hartati & Hambali, "Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik di Tengah Perubahan Politik," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3404>.

<sup>3</sup> Maghfira Faraidiany, Novita Sari, dan Siti Hardiyanti, "Polemik Politik Identitas Di Indonesia," *Journal of Political Sphere (JPS)* 3, no. 2 (2022): 60–100, <https://jurnal.usk.ac.id/JPS/article/view/30496/17314>.

Hingga kini, NU memainkan peran strategis sebagai penjaga moderasi Islam (Islam wasathiyah) di tengah meningkatnya polarisasi dan ekstremisme agama. Peran politik NU berkembang bukan hanya dalam konteks kekuasaan, tetapi sebagai kekuatan civil society yang aktif dalam membangun demokrasi, keadilan sosial, dan perdamaian. Melalui pendekatan kultural, pendidikan, dan diplomasi keagamaan, NU terus membentuk arah perjalanan bangsa, menjadikan agama sebagai inspirasi etis dalam kehidupan bernegara.

Pada era pasca-kemerdekaan, NU terlibat langsung dalam sistem politik formal dengan membentuk Partai Nahdlatul Ulama (PNU) setelah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952. Melalui partai ini, NU berhasil mendapatkan posisi penting dalam kabinet dan parlemen pada era demokrasi parlementer. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika politik nasional, NU memutuskan untuk kembali ke “Khittah 1926” dalam Mukhtamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Keputusan ini menandai kembalinya NU pada jalur sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak terlibat dalam politik praktis. Meski demikian, NU tetap memainkan peran penting dalam politik kebangsaan melalui pendekatan kultural. Dalam konteks ini, NU tidak membentuk partai politik, tetapi tetap menyampaikan aspirasi umat, menjadi kekuatan moral bangsa, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Pada masa reformasi, NU terus menunjukkan pengaruh politiknya melalui kader-kader yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, baik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun saluran lainnya. Selain itu, NU aktif dalam isu-isu kebangsaan seperti penguatan demokrasi, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Pendekatan Islam wasathiyah (moderat) yang dikembangkan NU menjadi pilar penting dalam meredam radikalisme dan menjaga pluralitas bangsa. NU secara konsisten menolak ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan. Melalui jaringan pesantren dan organisasi sayapnya seperti GP Ansor dan Fatayat, NU terus mendorong kesadaran politik warga yang cerdas, inklusif, dan berbasis akhlak. Dengan demikian, meskipun secara formal NU tidak lagi menjadi partai politik, peranannya dalam membentuk arah dan nilai politik kebangsaan tetap sangat besar. NU bukan sekadar pengamat, tetapi aktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, mengawal demokrasi, serta mengembangkan politik yang berlandaskan pada nilai keislaman dan kemanusiaan yang universal.

### 3. Peran Nahdlatul Ulama di Bidang Sosial dan Ekonomi

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaannya. NU meyakini bahwa dakwah Islam tidak cukup hanya melalui ceramah dan pendidikan, tetapi juga harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, serta memberdayakan umat agar menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) yang menjadi dasar berbagai program sosial NU sejak awal berdirinya.

Salah satu wujud nyata dari peran sosial NU adalah pendirian Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengelola potensi zakat, infaq, dan sedekah dari warga NU dan masyarakat umum. Dana yang terkumpul disalurkan untuk berbagai program strategis seperti bantuan pendidikan, santunan kesehatan, pembangunan rumah ibadah, hingga program-program ekonomi produktif untuk kaum dhuafa dan pelaku usaha mikro. Dalam beberapa tahun terakhir, LAZISNU telah mencatat peningkatan signifikan dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat, sebagai bukti meningkatnya kesadaran berzakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat oleh NU<sup>1</sup>.

Selain itu, NU juga membentuk Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang bertugas menggerakkan sektor usaha berbasis komunitas, seperti koperasi pesantren (kopontren),

warung NU, dan pendampingan UMKM. Pesantren-pesantren NU bahkan banyak yang telah mengembangkan unit-unit usaha seperti pertanian organik, peternakan, percetakan, konveksi, hingga toko online. Upaya ini sejalan dengan strategi NU dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang seringkali tidak berpihak pada rakyat kecil<sup>2</sup>.

Khusus dalam konteks penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan, NU mendirikan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI-NU) yang aktif dalam kegiatan respons cepat terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. LPBI-NU menjalankan pendekatan berbasis komunitas dan gotong royong, serta bekerja sama dengan lembaga nasional dan internasional dalam menyediakan bantuan logistik, trauma healing, dan rekonstruksi pasca bencana<sup>3</sup>. Keterlibatan NU dalam isu-isu kebencanaan juga memperkuat posisi ormas ini sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial di tingkat akar rumput.

Peran ekonomi NU semakin diperkuat dengan keterlibatan aktif dalam pengembangan wakaf produktif, yang tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik seperti masjid dan madrasah, tetapi juga untuk investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif. Wakaf tunai dikelola secara profesional oleh lembaga seperti LWP-NU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU), dan mulai diarahkan pada investasi yang memberikan hasil berkelanjutan untuk mendanai program sosial NU<sup>4</sup>.

Program pemberdayaan ekonomi NU juga menargetkan kaum muda dan perempuan melalui organisasi-organisasi sayap seperti Fatayat NU dan IPPNU, yang memberikan pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan pendampingan usaha kecil. Gerakan ini membuktikan bahwa NU memandang pemberdayaan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya (holistik), dan bukan semata program karitatif jangka pendek.

Secara keseluruhan, pendekatan sosial dan ekonomi NU mencerminkan strategi dakwah yang adaptif dan solutif terhadap permasalahan umat. NU berupaya menghadirkan Islam yang bukan hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga menjawab tantangan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketertinggalan ekonomi melalui pendekatan struktural dan kultural. Dengan demikian, NU tidak hanya menjadi penjaga moralitas, tetapi juga agen transformasi sosial yang menjawab kebutuhan umat secara nyata dan kontekstual di tengah perubahan zaman.

## KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama (NU) telah memainkan peran strategis dan multidimensional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak sebelum kemerdekaan hingga era kontemporer. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tidak hanya berkiprah dalam ranah keagamaan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, NU melalui jaringan pesantren dan lembaga pendidikan formal telah mencetak generasi Muslim yang berakhlak, berilmu, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Di bidang politik, NU hadir sebagai kekuatan moral dan kultural yang konsisten memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, serta menolak radikalisme dan ekstremisme.

---

<sup>4</sup> 1. LAZISNU. *Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat dan Dana Sosial Tahun 2022*. Jakarta: LAZISNU Pusat, 2023.

2. Bruinessen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 202–205.

3. LPBI-NU. *Laporan Tanggap Darurat Bencana Nasional*, 2021. Diakses dari: <https://lpbinu.or.id>

4. LWP-NU. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PBNU, 2020.

Sementara dalam bidang sosial dan ekonomi, NU menunjukkan keberpihakan kepada umat melalui program-program pemberdayaan berbasis komunitas, seperti pengelolaan zakat, wakaf produktif, koperasi pesantren, serta respons terhadap bencana. Lembaga-lembaga seperti LAZISNU, LPNU, dan LPBI-NU menjadi bukti konkret kontribusi NU dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat. Komitmen NU terhadap prinsip Islam moderat (wasathiyah), toleransi, keseimbangan, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Dengan demikian, NU tidak hanya berperan sebagai pelestari tradisi keislaman Nusantara, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani nilai-nilai keislaman dan semangat kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran NU tetap relevan dan dibutuhkan sebagai pilar moral dan sosial dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus sebagai penjaga harmoni dan persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Faraidiany, Maghfira, Novita Sari, dan Siti Hardiyanti. "Polemik Politik Identitas Di Indonesia." *Journal of Political Sphere (JPS)* 3, no. 2 (2022): 60–100.  
<https://jurnal.usk.ac.id/JPS/article/view/30496/17314>.
- Hambali, Hartati &. "Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik di Tengah Perubahan Politik." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1 (2018): 35.  
<https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3404>.
- Hermi, Sitti, Basrin Melamba, Fatma, Herman, dan Syahrudin. "Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Kendari, 1990-2019." *Journal Idea Of History* 05, no. 02 (2022).